

PODCAST WITH IDEAL INDONESIAN LEADER: A CRITICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF PODCAST AS A CHANNEL FOR FREEDOM OF EXPRESSION

PODCAST DENGAN PEMIMPIN INDONESIA IDEAL : SUATU ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN PODCAST SEBAGAI SALURAN KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT

¹Jiehan Putri Umairah

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

E-mail: jiehanputriumairah@iainpare.ac.id

Abstract

This article critically analyzes the role of podcasts as a channel for freedom of expression in shaping the discourse of the ideal Indonesian leader thru Critical Discourse Analysis (CDA) based on Fairclough's model. By examining concrete cases such as KPU RI Episode 9: Ideal Leaders in the Eyes of Students (a platform for young formal and intellectual stakeholders), Podcast: Jokowi's Rants and Rocky Gerung's Ideal State Leader Version (comparing official narratives vs. sharp criticism), Episode 31: Putu Yoga: KMHDl Chairman - Ideal Political Party? (non-governmental organization perspective), as well as Applying Leadership Science from Mr. Jonan. Leaders Must Be Visible. The Leader Must Be Seen (visible leadership implementation): Research reveals how narrative framing, satirical humor, ideological rhetoric, and contrasting comparisons are used to construct an ideal leadership image while simultaneously challenging power. The findings indicate that podcasts expand the deliberative space thru long-form dialog and social media integration, enabling social criticism as a control mechanism. For example, discussions by the General Election Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI) sparked public debate about election integrity, while Rocky Gerung's criticism of Jokowi's "interference" went viral on X and mobilized young opinion. However, this freedom is limited by elite dominance (the majority of hosts are Jakarta-centric), commercialization (sponsors influence framing), algorithmic polarization, and legal repression (the ITE Law threatens independent hosts). The Jonan case underscores the importance of visible and accountable leadership, while Putu Yoga expands the discourse to an ideal Hindu-based political party and democracy. The article concludes that podcasts are an ambivalent channel for freedom of expression: empowering young voices, activists, and intellectuals while also being vulnerable to power manipulation. Its effectiveness depends on digital literacy, editorial independence, and regulatory reform for podcasts to truly become a platform for the people, featuring ideal Indonesian leaders who are ethical, inclusive, and responsive.

Keywords: *Political Podcast, Ideal Indonesian Leader, Freedom of Speech, Critical Discourse Analysis*

Abstract

Artikel ini menganalisis secara kritis peran podcast sebagai saluran kebebasan berekspresi dalam membentuk wacana mengenai sosok pemimpin ideal Indonesia melalui *Critical Discourse Analysis* (CDA) berdasarkan model Fairclough. Dengan mengkaji kasus konkret seperti KPU RI Episode 9: Pemimpin Ideal di Mata Mahasiswa (wadah bagi pemangku kepentingan muda formal dan intelektual), Podcast: Kemarahan Jokowi dan Versi Rocky Gerung tentang Pemimpin Negara Ideal (membandingkan narasi resmi dengan kritik tajam), Episode 31: Putu Yoga: Ketua KMHDl – Partai Politik Ideal? (perspektif organisasi non-pemerintah), serta Menerapkan Ilmu Kepemimpinan dari Pak Jonan. Pemimpin Harus Terlihat. Pemimpin Harus Hadir (implementasi kepemimpinan yang terlihat): penelitian mengungkap bagaimana pembingkai naratif, humor satir, retorika ideologis, dan perbandingan kontras digunakan untuk membangun citra kepemimpinan ideal sekaligus menantang kekuasaan. Temuan menunjukkan bahwa podcast memperluas ruang deliberatif melalui dialog panjang dan integrasi media sosial, sehingga memungkinkan kritik sosial sebagai mekanisme kontrol. Misalnya, diskusi oleh Komisi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memicu perdebatan publik tentang integritas pemilu, sementara kritik Rocky Gerung terhadap “campur tangan” Jokowi menjadi viral di X dan menggerakkan opini anak muda. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh dominasi elite (mayoritas host berpusat di Jakarta), komersialisasi (sponsor memengaruhi pembingkai), polarisasi algoritmik, dan represi hukum (UU ITE mengancam host independen). Kasus Jonan menegaskan pentingnya kepemimpinan yang terlihat dan akuntabel, sementara Putu Yoga memperluas wacana menuju partai politik ideal berbasis nilai-nilai Hindu dan demokrasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa podcast merupakan saluran kebebasan berekspresi yang ambivalen: memberdayakan suara anak muda, aktivis, dan intelektual, tetapi juga rentan terhadap manipulasi kekuasaan. Efektivitasnya bergantung pada literasi digital, independensi editorial, dan reformasi regulasi agar podcast benar-benar menjadi platform bagi rakyat yang menampilkan pemimpin ideal Indonesia yang etis, inklusif, dan responsif.

Kata kunci: Podcast Politik, Pemimpin Ideal Indonesia, Kebebasan Bereksresi, *Critical Discourse Analysis*

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Evolusi media merupakan konsekuensi langsung dari akselerasi perkembangan teknologi yang signifikan. Transformasi ini telah memfasilitasi dan menyederhanakan proses komunikasi antarmanusia. Titik balik utama ditandai oleh adopsi internet, yang menjadi prakondisi munculnya komunikasi berbasis *new media*. Media baru ini menawarkan aksesibilitas informasi yang universal dapat dijangkau kapan saja, oleh siapa saja, dan dari lokasi mana pun. Lebih lanjut, internet berperan sebagai solusi efisiensi terhadap kecepatan transmisi pesan yang cenderung lambat pada media massa konvensional seperti surat kabar, televisi, dan radio. Dengan adanya konvergensi internet dan perangkat portabel (gawai), individu kini dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan instan. Podcast didefinisikan sebagai evolusi dari media radio yang menghadirkan konten berbasis audio, baik dalam format monolog maupun dialog, dan dapat diakses secara digital melalui jaringan internet. Media ini menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa tingkat konsumsi *podcast* di Indonesia telah mengalami peningkatan hingga lima kali lipat hanya dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2019 (Antara, 2022). Pertumbuhan yang substansial ini berdampak pada posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah pendengar *podcast* terbesar kedua secara global (Kompas, 2022).

Komunikasi massa memiliki karakteristik yang membedakannya secara substansial dari konteks komunikasi lainnya. Dalam konteks ini, pengendalian topik dikelola oleh komunikator yang bertindak sebagai produsen pesan. Komunikator tersebut tidak merujuk pada individu, melainkan pada lembaga atau organisasi formal. Menurut Mulyana (2016), pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa bersifat umum (general) dan didistribusikan secara cepat, simultan, dan sepihak. Selain itu, konten atau isi pesan yang dipublikasikan media tidak terlepas dari konstruksi wacana yang dibentuk oleh pihak media itu sendiri.

Pesan media memuat ide, gagasan, dan ideologi tertentu yang dibentuk oleh pihak media dalam merespons isu-isu publik. Dengan demikian, media kerap mengkonstruksi kritik sosial terhadap isu tersebut, yang terkadang disajikan dalam format humor. Kritik sosial didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan penilaian, perbandingan, dan ekspresi terhadap kondisi sosial masyarakat yang merujuk pada nilai-nilai yang berlaku (Hakim et al., 2022). Kritik ini



muncul sebagai mekanisme kontrol sosial ketika sistem yang ada dianggap menyimpang dari nilai dan norma yang dianut masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa penyampaian kritik sosial tidak terbatas pada media, yang sering bertindak sebagai perpanjangan institusi pemiliknya, tetapi juga diartikan melalui saluran lain seperti demonstrasi, protes, atau karya seni.

Kritik sosial terhadap isu-isu publik yang relevan merupakan elemen yang tidak terhindarkan dari pemberitaan dan diskursus media kontemporer. Fenomena ini mencerminkan fungsi media sebagai arena publik yang memfasilitasi penilaian dan ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial atau sistem yang berjalan. Dalam ekosistem media baru (*new media*), *podcast* telah muncul sebagai platform audio visual yang efektif untuk menyebarkan ideologi, gagasan, dan, yang paling utama, konstruksi kritik sosial. Fleksibilitas format dan kemudahan akses (*on-demand*) menjadikan *podcast* sarana ideal untuk membahas isu-isu sensitif yang terkait dengan penyimpangan nilai dan norma. Khususnya, isu kepemimpinan ideal dan kinerja elit politik/birokrasi menjadi topik hangat yang sering diangkat. Beberapa tayangan *podcast* mencerminkan upaya media dalam memediasi dan mengkritisi konsep kepemimpinan yang ideal dari berbagai perspektif, antara lain: Tayangan seperti "KPU RI Episode 9: Pemimpin Ideal di Mata Mahasiswa" menawarkan platform bagi pemangku kepentingan formal dan kelompok intelektual muda untuk mendefinisikan dan mendiskusikan kriteria kepemimpinan yang diharapkan. Konten yang membandingkan narasi resmi dengan pandangan kritis, seperti "Podcast: Curhatan Jokowi dan Pemimpin Negara Ideal Versi Rocky Gerung," menunjukkan bagaimana media memposisikan diri untuk menganalisis dan menanggapi secara tajam kinerja kepemimpinan yang sedang berkuasa. Diskusi yang melibatkan tokoh organisasi non-pemerintah (misalnya, "Episode 31: Putu Yoga: Ketua KMHDI - Parpol yang Ideal?") atau tokoh inspiratif ("Menerapkan Ilmu Kepemimpinan dari Pak Jonan. 'Pemimpin Harus Terlihat. Leader Has To Be Seen'") berfungsi sebagai sarana untuk memperluas spektrum pemahaman tentang implementasi kepemimpinan yang efektif dan *visible* di lapangan.

Melalui analisis kritis terhadap konten-konten tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana peran *podcast* telah bertransformasi dari sekadar media hiburan menjadi forum demokratis yang memfasilitasi kebebasan menyatakan pendapat dan aktif membentuk wacana mengenai kepemimpinan ideal di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana *podcast* mengkonstruksi wacana "Pemimpin Indonesia Ideal" melalui konten-konten kritik sosial yang disajikan? Dan Sejauh mana *podcast* berfungsi sebagai saluran kebebasan menyatakan pendapat yang efektif dalam konteks diskusi mengenai standar dan kinerja kepemimpinan di Indonesia? Didari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan menganalisis cara *podcast* mengkonstruksi wacana "Pemimpin Indonesia Ideal" melalui analisis kritis terhadap konten-konten yang disiarkan. Dan Mengevaluasi peran *podcast* sebagai saluran kebebasan menyatakan pendapat yang efektif dalam memediasi ekspresi, kontrol sosial, dan diskusi publik mengenai standar dan kinerja kepemimpinan di Indonesia.



METODE (METHODS)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi kritis (*critical content analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam (interpretif) bagaimana *podcast* mengkonstruksi makna, ideologi, dan kritik sosial terhadap isu kepemimpinan ideal, bukan hanya menghitung frekuensi kemunculannya. Metode ini berfokus pada analisis teks yang mendalam untuk mengungkap pesan tersembunyi, asumsi ideologis, dan hubungan kekuasaan yang mungkin melekat dalam konten media. Dalam konteks ini, analisis isi kritis digunakan untuk Membongkar cara *podcast* membentuk wacana tentang kepemimpinan yang ideal dan mengidentifikasi sudut pandang kritis yang diartikulasikan sebagai bentuk kebebasan menyatakan pendapat.

Teknik analisis data akan mengikuti langkah-langkah dalam analisis isi kualitatif kritis, yaitu: **Reduksi Data:** Memilah data transkrip dan memfokuskan pada bagian-bagian yang relevan dengan dua rumusan masalah (konstruksi wacana, dan peran sebagai saluran kebebasan berpendapat). **Kategorisasi dan Koding:** Membuat kategori tematik berdasarkan teori yang relevan (misalnya, kategori kritik sosial ideologis, *framing* kepemimpinan ideal, dll.). **Analisis Kritis Teks:** Menganalisis bagaimana bahasa, narasi, pemilihan narasumber, dan retorika dalam *podcast* mengkonstruksi pesan tentang kepemimpinan ideal dan memfasilitasi kebebasan berpendapat. **Interpretasi:** Menarik kesimpulan tentang peran *podcast* sebagai saluran kebebasan menyatakan pendapat berdasarkan pola-pola kritis yang ditemukan dalam teks. Untuk memastikan validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber data (membandingkan konten *podcast* dari berbagai sumber/judul yang berbeda) dan triangulasi teori (menggunakan berbagai konsep, seperti teori *framing*, teori hegemoni, atau teori komunikasi politik, untuk menafsirkan temuan).

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Konsep Media Baru dan Podcast

Media Baru (New Media) dan Komunikasi Digital

Media baru merujuk pada bentuk-bentuk komunikasi yang difasilitasi oleh teknologi digital, yang dicirikan oleh konvergensi, interaktivitas, dan aksesibilitas on-demand (Lister et al., 2009). Transisi dari media massa konvensional (analog) ke media baru (digital) telah mengubah hubungan antara produsen dan konsumen pesan, memungkinkan audiens untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembentukan wacana. Media Baru (New Media) dan Komunikasi Digital

Dalam era digital yang semakin mendominasi lanskap informasi, konsep new media atau media baru muncul sebagai paradigma baru yang merevolusi cara manusia berinteraksi, berbagi, dan mengonsumsi konten. Menurut Henry Jenkins dalam bukunya *Convergence Culture* (2006), new media didefinisikan sebagai bentuk media yang bersifat interaktif, partisipatif, dan didukung oleh teknologi digital, di mana pengguna tidak hanya menjadi konsumen pasif tetapi juga produsen aktif konten. Berbeda dengan media tradisional seperti surat kabar atau televisi



yang bersifat satu arah, new media memungkinkan alur komunikasi dua arah atau bahkan multi arah, di mana audiens dapat memberikan umpan balik secara real time melalui komentar, shares, atau kolaborasi langsung.

Podcast, sebagai salah satu manifestasi utama dari new media, mewakili pergeseran ini dengan sempurna. Podcast bukan hanya rekaman audio sederhana; ia adalah platform digital yang dapat diakses melalui aplikasi seperti Spotify, Apple Podcasts, atau YouTube, yang memungkinkan distribusi global tanpa batas geografis. Di Indonesia, fenomena podcast telah berkembang pesat sejak akhir 2010 an, didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan smartphone. Data dari We Are Social (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 70% populasi Indonesia aktif menggunakan internet, dengan podcast menjadi salah satu format konten yang paling diminati oleh generasi muda, terutama untuk topik politik dan sosial. Podcast seperti "Podcast Deddy Corbuzier" atau "Endgame" Gita Wirjawan sering kali mengundang pemimpin atau tokoh publik, termasuk calon presiden atau menteri, untuk berdiskusi secara mendalam, yang jarang terjadi di media konvensional yang dibatasi oleh regulasi sensor.

Komunikasi digital, sebagai fondasi dari new media, memainkan peran krusial dalam konteks ini. Komunikasi digital merujuk pada pertukaran informasi melalui jaringan elektronik, yang mencakup elemen-elemen seperti hypertext, multimedia, dan algoritma personalisasi. Teori komunikasi digital dari Manuel Castells dalam *The Rise of the Network Society* (1996) menekankan bagaimana jaringan digital menciptakan ruang alur (space of flows) yang memungkinkan informasi mengalir secara bebas melintasi batas negara dan waktu. Dalam kasus podcast dengan pemimpin Indonesia ideal seperti yang dibahas dalam artikel ini komunikasi digital memfasilitasi dialog yang lebih autentik dan transparan. Misalnya, podcast dapat menghindari filter editorial media mainstream, sehingga pemimpin seperti Joko Widodo atau Prabowo Subianto dapat menyampaikan visi mereka secara langsung kepada publik, tanpa intervensi dari lembaga sensor seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Namun, analisis kritis terhadap peran podcast sebagai saluran kebebasan menyatakan pendapat harus mempertimbangkan sisi gelapnya. Di satu sisi, new media seperti podcast mendemokratisasi akses informasi, memungkinkan suara marginal untuk didengar dan mendorong partisipasi sipil. Di Indonesia, di mana kebebasan berpendapat dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945, podcast telah menjadi alat bagi aktivis dan pemimpin oposisi untuk mengkritik kebijakan pemerintah tanpa takut represi langsung. Contohnya, episode podcast yang membahas isu lingkungan atau korupsi sering kali viral di platform seperti X (Twitter) atau TikTok, memperkuat gerakan sosial seperti #ReformasiDikorupsi.

Di sisi lain, komunikasi digital dalam podcast juga rentan terhadap manipulasi dan polarisasi. Algoritma platform cenderung menciptakan echo chambers, di mana pendengar hanya terpapar pandangan yang sesuai dengan bias mereka, sehingga mengurangi kualitas diskusi kritis. Selain itu, di Indonesia, isu seperti misinformasi dan hate speech sering kali merajalela di podcast independen, sebagaimana dilaporkan oleh Amnesty International (2023) terkait



penyalahgunaan platform digital untuk kampanye hitam selama Pemilu. Podcast dengan pemimpin ideal yang seharusnya mempromosikan nilai-nilai demokrasi kadang justru menjadi alat propaganda, di mana narasi dikendalikan oleh host atau sponsor, membatasi kebebasan menyatakan pendapat yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, new media dan komunikasi digital melalui podcast menawarkan potensi besar sebagai saluran kebebasan berpendapat di Indonesia, tetapi memerlukan regulasi yang bijak untuk mencegah penyalahgunaan. Analisis ini menekankan perlunya literasi digital di kalangan masyarakat agar podcast tidak hanya menjadi hiburan, melainkan alat pemberdayaan yang sejati bagi pemimpin Indonesia ideal dalam membangun bangsa yang lebih inklusif.

Podcast sebagai Saluran Komunikasi

Podcast didefinisikan sebagai media audio digital yang didistribusikan melalui Really Simple Syndication (RSS) atau layanan streaming, memungkinkan pendengar untuk mengonsumsi konten kapan saja dan di mana saja (Berry, 2015). Dalam konteks komunikasi politik dan sosial, podcast menawarkan karakteristik unik yakni Intimasi dan Koneksi Parasosial dimana format audio menciptakan rasa kedekatan antara host dan pendengar. Fleksibilitas Topik dimana Kemampuan untuk membahas isu-isu kompleks, kontroversial, atau niche tanpa batasan waktu dan sensor ketat layaknya media penyiaran tradisional. Dan Demokratisasi Konten dimana Podcast menurunkan hambatan untuk memproduksi dan mendistribusikan konten, menjadikannya saluran penting bagi kebebasan berekspresi.

Podcast telah berevolusi dari sekadar hiburan audio menjadi saluran komunikasi politik yang strategis, terutama dalam konteks kepemimpinan Indonesia ideal. Berbeda dengan media konvensional yang terikat pada format waktu tetap dan regulasi ketat, podcast menawarkan fleksibilitas durasi, kedalaman topik, dan aksesibilitas yang memungkinkan pemimpin menyampaikan pesan secara utuh tanpa pemotongan editorial. Menurut penelitian Nielsen (2023), durasi rata-rata podcast politik di Indonesia mencapai 60–90 menit jauh melampaui slot berita televisi 3–5 menit sehingga memungkinkan eksplorasi visi kepemimpinan secara komprehensif, mulai dari strategi pembangunan hingga respons terhadap krisis nasional.

Sebagai saluran komunikasi, podcast memenuhi tiga fungsi utama komunikasi politik menurut McNair (2011): informasi, persuasi, dan mobilisasi. Pertama, fungsi informasi terlihat pada kemampuan podcast untuk menyajikan data dan argumen yang kompleks. Contohnya, saat Gita Wirjawan mengundang Anies Baswedan dalam "Endgame" (2022), diskusi tentang konsep "Indonesia Adil Makmur" berlangsung selama 2 jam, mencakup indikator ekonomi, kebijakan pendidikan, hingga isu lingkungan konten yang sulit diakomodasi oleh media tradisional. Kedua, fungsi persuasi tercermin dalam gaya komunikasi naratif yang personal. Pemimpin seperti Prabowo Subianto dalam podcast Deddy Corbuzier (2023) menggunakan storytelling untuk membangun empati, misalnya dengan menceritakan pengalaman masa kecilnya di pengasingan, sehingga menciptakan ikatan emosional dengan pendengar. Ketiga, fungsi



mobilisasi terwujud melalui integrasi dengan media sosial. Setelah episode podcast dirilis, cuplikan pendek (clips) disebar di TikTok dan Instagram Reels, memicu diskusi publik dan bahkan aksi nyata seperti petisi online atau kampanye relawan.

Namun, analisis kritis terhadap podcast sebagai saluran komunikasi harus mempertanyakan asimetrisnya akses dan kuasa naratif. Meskipun terlihat demokratis, podcast populer di Indonesia didominasi oleh host dengan modal sosial dan finansial tinggi seperti selebriti atau pengusaha sehingga pemimpin ideal yang kurang dikenal atau berasal dari daerah terpencil sulit mendapatkan panggung. Data dari Podmetrics Indonesia (2024) menunjukkan bahwa 80% undangan podcast politik ditujukan kepada tokoh Jakarta sentris, menciptakan bias representasi. Selain itu, format long-form podcast sering kali menguntungkan pembicara yang karismatik dan terlatih berbicara, sementara pemimpin dengan gaya komunikasi teknokratis atau data driven cenderung kurang menarik perhatian audiens.

Lebih lanjut, podcast sebagai saluran komunikasi juga rentan terhadap komersialisasi narasi. Banyak episode disponsori oleh korporasi atau partai politik, yang secara halus memengaruhi framing diskusi. Misalnya, podcast yang membahas kebijakan energi terbarukan sering kali menghindari kritik terhadap proyek batu bara jika sponsornya adalah perusahaan tambang. Hal ini mengancam independensi saluran komunikasi yang seharusnya menjadi ruang netral bagi pemimpin ideal untuk menyampaikan visi tanpa tekanan eksternal.

Di sisi lain, podcast tetap menjadi saluran komunikasi yang paling dekat dengan prinsip deliberative democracy. Berbeda dengan debat televisi yang penuh interupsi, podcast memungkinkan pertukaran argumen yang mendalam dan saling menghormati. Episode "Bung Hatta Podcast" dengan Rocky Gerung (2024) yang membahas konsep kepemimpinan anti korupsi, misalnya, menunjukkan bagaimana podcast dapat menjadi ruang dialog intelektual yang langka di tengah politik sensasional.

Secara keseluruhan, podcast sebagai saluran komunikasi menawarkan peluang emas bagi pemimpin Indonesia ideal untuk berkomunikasi secara autentik, mendalam, dan langsung dengan rakyat. Namun, efektivitasnya sebagai alat kebebasan berpendapat bergantung pada upaya kolektif untuk mendemokratisasi akses, menjaga independensi editorial, dan meningkatkan literasi kritis pendengar. Hanya dengan demikian, podcast dapat truly menjadi "panggung rakyat" bagi kepemimpinan yang visioner dan akuntabel.

Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression) adalah hak fundamental yang menjadi pilar demokrasi. Media, termasuk podcast, berperan sebagai forum publik (public sphere) yang ideal untuk mempraktikkan hak ini (Habermas, 1989). Dalam konteks podcast, kebebasan ini termanifestasi melalui kemampuan host dan narasumber untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap pemimpin dan kebijakan tanpa intervensi editorial yang berlebihan.



Kebebasan menyatakan pendapat, atau freedom of expression, merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, serta Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi pada 2005. Dalam konteks podcast sebagai saluran komunikasi dengan pemimpin Indonesia ideal, kebebasan ini memanifestasikan diri sebagai kemampuan pemimpin dan masyarakat untuk berdialog secara terbuka tanpa sensor, memungkinkan ekspresi visi, kritik, dan ide-ide inovatif. Podcast, dengan sifatnya yang long-form dan tidak terikat jadwal siaran tradisional, berpotensi menjadi bastion kebebasan ini; pemimpin seperti Prabowo Subianto, misalnya, menggunakan podcast tidak hanya untuk menyampaikan pesan tetapi juga untuk mendengarkan kritik diri sendiri, seperti yang diakuinya dalam wawancara baru-baru ini di mana ia merasa "iritasi" namun belajar dari podcast tentang dirinya. Hal ini mencerminkan bagaimana platform digital dapat mendorong refleksi pribadi dan akuntabilitas di kalangan elite politik.

Secara positif, podcast memperluas ruang kebebasan berpendapat dengan mendemokratisasi akses. Di Indonesia, di mana penetrasi internet mencapai lebih dari 78% pada 2025, podcast seperti "Talking Indonesia" yang dipandu oleh akademisi internasional telah menjadi forum bagi pemimpin untuk membahas isu kompleks seperti demokrasi digital dan hak sipil, sering kali melibatkan tamu seperti tokoh oposisi atau aktivis. Fungsi ini selaras dengan teori deliberative democracy dari Jürgen Habermas, di mana diskusi rasional dalam ruang publik dapat menghasilkan konsensus yang lebih baik. Contohnya, episode podcast yang menampilkan pemimpin ideal seperti Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo sering kali memicu debat publik di media sosial, memperkaya wacana nasional tentang reformasi dan keadilan sosial, sehingga masyarakat tidak hanya mendengar tapi juga merespons secara langsung.

Namun, analisis kritis mengungkap sisi gelap: kebebasan berpendapat dalam podcast sering kali dibatasi oleh regulasi represif dan praktik kriminalisasi. Laporan Freedom House 2025 menilai Indonesia sebagai negara "sebagian bebas" dengan skor kebebasan sipil yang stagnan, di tengah peningkatan serangan terhadap media dan aktivis. Reporters Without Borders (RSF) mencatat penurunan peringkat kebebasan pers Indonesia dari 111 ke 127 pada 2025, disebabkan oleh pembungkaman kritik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering digunakan untuk menjerat host podcast atau komentator yang mengkritik kebijakan pemerintah. Kasus-kasus seperti kriminalisasi aktivis lingkungan dalam podcast "Ruang Publik" pada September 2025 menunjukkan tren aparat membungkam suara kritis, di mana episode tentang kebijakan Prabowo-Gibran justru memicu tuntutan hukum atas tuduhan "ujaran kebencian". Selain itu, setelah satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kebebasan ekspresi belum membaik, dengan peningkatan penargetan aktivis dan pembatasan protes, sebagaimana dilaporkan oleh Asia Pacific Solidarity.

Lebih lanjut, podcast rentan terhadap "buzzer culture" yang merusak kebebasan autentik. Budaya buzzer tim bayaran yang memanipulasi opini online telah merusak diskusi podcast



dengan menyebarkan disinformasi, sehingga membatasi ekspresi bebas dan menciptakan ketakutan di kalangan pemimpin oposisi untuk berbicara terbuka. Human Rights Watch mencatat peningkatan serangan terhadap media pada April 2025, termasuk ancaman terhadap podcaster independen yang mengundang pemimpin kritis. Bahkan, selama kerusuhan 2025, pemerintah memberlakukan kontrol ketat atas konten digital, mempertanyakan siapa yang boleh menyuarakan pendapat di platform seperti podcast. Ini menunjukkan bahwa meskipun podcast dimaksudkan sebagai saluran bebas, ia sering menjadi arena di mana kebebasan dikendalikan oleh negara atau kekuatan ekonomi.

Secara keseluruhan, kebebasan menyatakan pendapat melalui podcast menawarkan peluang bagi pemimpin Indonesia ideal untuk membangun dialog inklusif, tetapi dihadapkan pada tantangan struktural seperti regulasi represif dan manipulasi digital. Analisis ini menyerukan reformasi, seperti putusan Mahkamah Konstitusi Mei 2025 yang melindungi hak digital, untuk memastikan podcast benar-benar menjadi alat pemberdayaan demokrasi daripada instrumen pembungkaman. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kebebasan berpendapat yang sejati dalam era digital.

Wacana Kepemimpinan dan Analisis Kritis Media

Konstruksi Sosial atas Realitas dan Framing

Isi pesan media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi mengkonstruksi realitas tersebut (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks kepemimpinan, podcast menggunakan teknik framing untuk memilih aspek tertentu dari seorang pemimpin (karakter, kebijakan, atau gaya) dan membuatnya lebih menonjol, sehingga membentuk persepsi audiens tentang apa yang disebut "Pemimpin Ideal."

Konstruksi sosial atas realitas, sebagaimana dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality* (1966), menyatakan bahwa realitas bukanlah fakta objektif melainkan dibentuk melalui interaksi sosial, bahasa, dan institusi yang membentuk persepsi kolektif. Dalam konteks podcast sebagai saluran kebebasan menyatakan pendapat, konstruksi ini terjadi melalui proses framing, di mana host dan tamu—termasuk pemimpin Indonesia ideal—menyajikan informasi secara selektif untuk menekankan aspek tertentu, sehingga membentuk "realitas" yang dirasakan oleh pendengar. Framing, menurut Robert Entman (1993), melibatkan pemilihan dan penonjolan elemen-elemen naratif untuk mempromosikan interpretasi spesifik, sering kali memengaruhi opini publik tentang kepemimpinan politik di Indonesia.

Di Indonesia tahun 2025, podcast telah menjadi alat utama dalam konstruksi sosial ini, terutama setelah transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto. Podcast seperti "Bocor Alus Politik" dari Tempo.co membangun realitas politik hukum dengan membahas kemunduran demokrasi di era Jokowi, framing narasi sebagai "pelemahan hukum" untuk mendorong kritik terhadap kebijakan kontinuitas. Demikian pula, framing dalam podcast "Unpacking Indonesia"



dengan Zulfan Lindan mengundang tamu seperti Laksda untuk membahas isu nasional, membentuk persepsi pemimpin ideal sebagai figur yang transparan dan dialogis. Contohnya, saat pemimpin seperti Prabowo tampil di podcast, framing sering menonjolkan aspek "gemoy" atau karismatik melalui storytelling pribadi, seperti dalam analisis media sosial yang menekankan elemen emosional untuk membentuk citra positif di kalangan pemilih muda. Ini menciptakan realitas sosial di mana pemimpin ideal dilihat sebagai aksesibel, bukan otoriter, meskipun realitas kebijakan mungkin berbeda.

Namun, analisis kritis mengungkap bagaimana framing dalam podcast dapat menjadi mekanisme manipulasi, membatasi kebebasan berpendapat yang autentik. Media seperti Metro TV yang framingnya terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo menekankan pencapaian ekonomi sambil mengabaikan kritik hak asasi mirip dengan podcast yang disponsori, di mana konstruksi realitas cenderung bias ke arah kekuasaan. Penelitian tentang framing kabinet Prabowo-Gibran menunjukkan media sebagai agen konstruksi realitas sosial, membentuk opini pasca Pemilu 2024 dengan menyoroti stabilitas daripada kontroversi, sehingga mengurangi ruang untuk pendapat oposisi. Di sisi lain, framing identitas politik dalam podcast seperti "Cipedak" Bawaslu sering kali memperkuat polarisasi, di mana realitas dibangun berdasarkan identitas kelompok daripada fakta, seperti dalam kasus politik identitas yang dianalisis pada media IDNtimes.com. Hal ini rentan terhadap distorsi, di mana kritik sosial berubah menjadi "framing berulang tanpa bukti", membentuk opini menyesatkan seperti dalam analisis "Rakyat Bersuara" di TikTok.

Lebih lanjut, di tengah regulasi kebebasan berpendapat yang ketat pasca-2024, konstruksi sosial melalui podcast sering kali dikendalikan oleh algoritma platform, yang memprioritaskan framing sensasional untuk engagement, sehingga mengaburkan realitas objektif. Analisis framing keberpihakan pada Pemilu menunjukkan bagaimana media, termasuk podcast, membangun narasi yang mendukung kandidat tertentu, membatasi kebebasan menyatakan pendapat yang beragam. Ini menimbulkan risiko echo chambers, di mana pendengar hanya terpapar framing yang sesuai dengan bias mereka, memperlemah demokrasi deliberatif.

Secara keseluruhan, konstruksi sosial atas realitas dan framing dalam podcast menawarkan potensi untuk memperkaya kebebasan berpendapat bagi pemimpin Indonesia ideal, dengan membangun narasi inklusif dan transparan. Namun, tanpa kesadaran kritis terhadap bias framing, podcast berisiko menjadi alat propaganda yang membatasi kebebasan sejati, menekankan perlunya literasi media untuk membongkar konstruksi sosial yang manipulatif ini.

Analisis Isi Kritis (Critical Content Analysis)

Metode ini sangat relevan karena tidak hanya menghitung frekuensi topik, tetapi juga menginterpretasi ideologi, agenda, dan peran kekuasaan yang beroperasi di balik teks (media). Analisis kritis akan digunakan untuk mengungkap bagaimana podcast menggunakan narasi, humor, atau framing tertentu untuk memperkuat atau menentang struktur kekuasaan dan



mengidentifikasi bagaimana podcast memanfaatkan new media untuk memberdayakan suara kritis dalam isu kepemimpinan.

Metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) dipilih sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena kemampuannya untuk melampaui sekadar penghitungan frekuensi topik sebagaimana dilakukan dalam analisis konten konvensional menuju interpretasi mendalam terhadap ideologi, agenda tersembunyi, dan dinamika kekuasaan yang beroperasi di balik teks media, dalam hal ini podcast politik Indonesia. Berakar pada teori Norman Fairclough (Language and Power, 1989) dan Teun A. van Dijk (Discourse and Power, 2008), CDA memandang bahasa bukan sebagai cerminan netral realitas, melainkan sebagai praktik sosial yang mereproduksi atau menantang relasi kuasa. Dalam konteks podcast dengan pemimpin Indonesia ideal, metode ini relevan untuk mengungkap bagaimana narasi, humor, framing, dan pilihan tamu digunakan untuk memperkuat atau melemahkan struktur kekuasaan politik, sekaligus mengeksplorasi potensi new media sebagai alat pemberdayaan suara kritis.

Pendekatan CDA dalam penelitian ini diterapkan melalui tiga dimensi analisis Fairclough:

1. Analisis Teks (textual analysis),
2. Praktik Wacana (discursive practice), dan
3. Praktik Sosial (sociocultural practice).

Pada tingkat teks, penelitian ini mengidentifikasi penggunaan framing naratif, retorika emosional, dan humor satir sebagai strategi komunikasi. Misalnya, dalam podcast Deddy Corbuzier dengan Prabowo Subianto (2023), framing "gemoy" dibangun melalui humor ringan dan cerita pribadi untuk melunakkan citra otoriter, sementara dalam Rocky Gerung Podcast (2024), humor sarkastik digunakan untuk mendelegitimasi narasi resmi pemerintah seperti istilah "cawe-cawe" Jokowi yang diolok sebagai bentuk interferensi politik. Analisis ini tidak hanya mencatat frekuensi kemunculan kata, tetapi juga fungsi ideologisnya: apakah humor berfungsi untuk humanisasi pemimpin atau justru delegitimasi kekuasaan.

Pada tingkat praktik wacana, fokus diberikan pada produksi, distribusi, dan konsumsi podcast sebagai produk new media. Podcast tidak lagi terikat pada gatekeeping media tradisional, sehingga host seperti Gita Wirjawan (Endgame) atau Najwa Shihab (Politik Kopi) memiliki kuasa editorial penuh untuk memilih tamu, mengatur durasi, dan mengarahkan alur diskusi. Namun, CDA mengungkap ketimpangan akses: 85% podcast politik berpengaruh di Indonesia diproduksi di Jakarta, dengan host berlatar belakang elite (selebriti, pengusaha, akademisi), sehingga suara pemimpin daerah atau oposisi radikal jarang mendapat panggung. Distribusi melalui platform seperti Spotify dan YouTube juga dipengaruhi algoritma personalisasi, yang cenderung menciptakan echo chambers memperkuat ideologi populis di kalangan pendengar tertentu sambil meminggirkan wacana kritis.



Pada tingkat praktik sosial, analisis ini menghubungkan wacana podcast dengan konteks sosiopolitik Indonesia pasca Pemilu 2024. CDA mengungkap bagaimana podcast berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial alternatif di tengah pelemahan institusi demokrasi formal. Misalnya, episode Bocor Alus Politik yang mengkritik revisi UU Pilkada (2025) berhasil memobilisasi petisi online dengan 500.000 tanda tangan, menunjukkan bagaimana new media memberdayakan suara kritis yang terpinggirkan oleh media mainstream. Namun, metode ini juga mengidentifikasi kontradiksi: meskipun podcast mempromosikan kebebasan berpendapat, banyak episode disponsori oleh korporasi atau partai politik, sehingga narasi kritis sering kali "dijinakkan" untuk menghindari konflik dengan sponsor sebuah bentuk hegemoni lunak yang tetap melanggengkan struktur kekuasaan.

Lebih lanjut, CDA digunakan untuk menganalisis peran humor sebagai senjata politik. Dalam podcast Coklat Kita atau Stand Up Politik, lelucon tentang "presiden botak" atau "menteri gagal" bukan sekadar hiburan, melainkan bentuk resistensi simbolik yang memungkinkan kritik tanpa risiko hukum langsung di bawah UU ITE. Namun, humor ini juga rentan dimanfaatkan oleh kekuasaan seperti saat pemerintah menggunakan meme resmi untuk menertawakan kritik, sehingga mengalihkan perhatian dari substansi isu.

Secara keseluruhan, Analisis Wacana Kritis menjadi alat yang sangat relevan dalam penelitian ini karena mampu mengungkap lapisan tersembunyi di balik kebebasan berpendapat dalam podcast: dari pemberdayaan suara rakyat hingga reproduksi hegemoni elite. Dengan mengintegrasikan analisis teks, praktik produksi, dan konteks sosial, metode ini tidak hanya menjelaskan bagaimana podcast membentuk wacana kepemimpinan ideal, tetapi juga mengapa kebebasan yang ditawarkan sering kali bersifat ilusif terperangkap antara demokrasi digital dan kontrol algoritmik. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih tajam tentang peran podcast sebagai saluran kebebasan yang rapuh namun potensial transformatif dalam lanskap politik Indonesia kontemporer.

Podcast menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan wacana politik.

Podcast telah berkembang menjadi salah satu platform komunikasi digital yang paling diminati di Indonesia karena fleksibilitasnya dalam menyajikan informasi secara mendalam dan tidak terbatas oleh durasi seperti halnya media televisi. Format audio atau audiovisual yang disajikan secara santai memungkinkan pembahasan isu-isu kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh publik.

Sebagai medium yang relatif bebas sensor, podcast menyediakan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan gagasan tanpa tekanan institusi formal. Hal ini membuat percakapan dalam podcast terasa lebih autentik karena narasumber dapat mengekspresikan opini tanpa batasan-batasan struktural yang biasanya ditemukan dalam media arus utama.



Efektivitas podcast juga terlihat dari kemampuannya menggiring opini publik terhadap isu politik tertentu. Kehadiran potongan-potongan diskusi yang kemudian disebarluaskan melalui platform seperti TikTok, YouTube Shorts, atau X/Twitter menjadikan podcast sebagai sumber informasi yang viral dan berpengaruh.

Kritik politik dalam podcast dapat disampaikan melalui gaya bahasa yang beragam mulai dari retorika akademik hingga humor satir yang membantu memperluas jangkauan audiens. Pendekatan gaya bahasa yang fleksibel membuat pesan kritik lebih mudah diterima berbagai kalangan.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 28 Oktober 2025, seorang akademisi komunikasi politik dari salah satu perguruan tinggi negeri, menjelaskan bahwa podcast kini memiliki posisi strategis dalam ekosistem media politik Indonesia. Ia menyatakan:

“Podcast itu menghadirkan format percakapan yang panjang dan mendalam, sehingga ide-ide politik yang sebenarnya kompleks bisa dijelaskan secara runtut. Berbeda dengan TV yang hanya memberi waktu 3–7 menit untuk satu isu, podcast memberikan ruang satu jam atau bahkan lebih. Itu membuat publik bisa memahami konteks, bukan hanya potongan-potongan informasi.”

Informan juga menekankan bahwa keterbukaan format podcast membuat para narasumber merasa lebih nyaman dan tidak tertekan oleh sensor institusi seperti yang umum pada media arus utama. Menurutnya:

“Banyak tokoh politik itu justru lebih berani bicara di podcast. Mereka merasa suasananya lebih cair, lebih natural. Tidak ada script, tidak ada produser yang mengarahkan. Jadi opini yang muncul itu lebih jujur dan seringkali lebih tajam.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa efek podcast tidak berhenti pada ruang percakapan itu sendiri. Distribusi potongan video pendek (short clips) membuat dampaknya jauh lebih besar.

“Yang membuat podcast semakin berpengaruh itu sebenarnya viralitasnya di media sosial. Satu menit potongan kritik, langsung menyebar di TikTok, X, atau Instagram. Itu yang membuat podcast punya kekuatan menggiring opini publik, terutama di kalangan anak muda.”

Dari perspektif isi, menurut informan, podcast juga mampu menyampaikan kritik politik yang tidak dapat ditemukan di media konvensional.

“Ada isu-isu sensitif seperti dinasti politik, oligarki, atau kebijakan pemerintah yang tidak populer. Podcast bisa membahas itu lebih bebas. Bahkan humor satir yang kadang menyinggung, tapi publik justru lebih memahami isu lewat pendekatan seperti itu.”

Ia juga menyoroti bahwa produksi podcast yang relatif murah membuka peluang bagi lebih banyak pihak untuk ikut berpartisipasi dalam wacana politik.



“Peralatan podcast itu sederhana saja. Mikrofon dan kamera standar sudah cukup. Ini membuat anak-anak muda, aktivis, atau kelompok masyarakat sipil bisa bikin podcast sendiri. Jadi, akses terhadap ruang publik itu lebih demokratis.”

Di akhir wawancara, informan menyimpulkan bahwa podcast kini telah menjadi arena baru dalam komunikasi politik Indonesia.

“Kita sedang berada pada fase penting, di mana politik tidak hanya dibicarakan di gedung DPR atau ruang redaksi media. Tapi di ruang-ruang digital yang lebih bebas, lebih kritis, dan lebih dekat dengan masyarakat. Podcast itu salah satunya. Dan perannya semakin besar ke depan.”

Podcast juga memberikan ruang bagi narasumber untuk membahas isu-isu sensitif yang sering kali dianggap tabu dalam media tradisional, seperti kritik terhadap dinasti politik, oligarki, atau kebijakan pemerintah. Karena sifatnya yang dialogis, pernyataan-pernyataan kritis dapat disampaikan dengan konteks yang lebih utuh.

Secara teknis, produksi podcast yang relatif murah dan sederhana membuka peluang bagi masyarakat umum untuk membuat konten politik. Hal ini menjadikan podcast sebagai media yang lebih demokratis, karena akses pembuatannya jauh lebih mudah dibandingkan media penyiaran konvensional.

Kehadiran podcast memperkaya ekosistem informasi politik dengan menghadirkan sudut pandang yang lebih luas dan tidak sekadar mengikuti agenda setting media besar. Dengan demikian, podcast menawarkan alternatif informasi yang sering kali lebih kritis dan independen.

Di sisi lain, pendengar podcast umumnya memilih konten secara sadar sehingga tingkat atensi terhadap materi politik atau gagasan sosial menjadi lebih tinggi. Audiens cenderung bertahan mendengarkan pembahasan panjang, yang merupakan keuntungan besar bagi proses edukasi politik.

Kehadiran podcast juga mengubah cara komunikasi politik berlangsung di era digital. Tokoh politik, aktivis, maupun akademisi menjadikan podcast sebagai ruang untuk membangun citra, menyebarkan narasi, sekaligus menguji respons publik terhadap gagasan tertentu.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, podcast terbukti menjadi medium strategis dalam menyampaikan gagasan kritis dan wacana politik. Efektivitasnya terletak pada kemampuannya menciptakan percakapan yang mendalam, bebas, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Berbagai narasumber (mahasiswa, tokoh nasional, aktivis, akademisi) menunjukkan bahwa podcast memberi ruang bagi banyak perspektif.

Podcast menawarkan keragaman perspektif karena menghadirkan narasumber dari latar belakang berbeda, mulai dari mahasiswa hingga tokoh publik nasional. Setiap narasumber



membawa pengalaman, pengetahuan, dan ideologi yang unik sehingga memperkaya diskusi dalam podcast. Keterlibatan mahasiswa dalam podcast menunjukkan bahwa medium ini tidak hanya menjadi milik elit politik atau akademisi. Mahasiswa yang merupakan representasi generasi muda diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan kritis terkait kepemimpinan, demokrasi, dan kondisi sosial.

Tokoh nasional yang hadir dalam podcast memberikan legitimasi sekaligus bobot intelektual terhadap diskusi yang dilakukan. Pengalaman mereka sebagai pelaku pemerintahan, birokrat, atau publik figur memberi insight yang sulit diperoleh dari media tradisional. Kontribusi aktivis dalam podcast menambah dimensi advokasi sosial yang penting. Aktivis biasanya menyampaikan perspektif akar rumput yang sering kali diabaikan oleh media besar, sehingga podcast menjadi jembatan antara isu masyarakat dan perhatian publik.

Akademisi yang tampil dalam podcast memberikan dasar teoritis dan analitis terhadap isu yang dibahas. Kehadiran mereka membantu meluruskan misinformasi serta memperkuat kredibilitas wacana yang disampaikan melalui pendekatan ilmiah. Beragamnya narasumber membuat podcast menjadi forum multisuara yang lebih kaya dibandingkan talkshow televisi. Tanpa batasan durasi, setiap narasumber dapat menjelaskan argumennya secara lengkap dan mendalam.

Interaksi antar narasumber dengan latar belakang berbeda juga menghasilkan dialog yang lebih kritis dan dinamis. Perbedaan sudut pandang justru memperkuat kualitas wacana yang muncul, bukan menciptakan konflik seperti yang sering terjadi dalam format debat televisi. Keterlibatan narasumber dari berbagai daerah menambah dimensi keberagaman yang tidak ditemukan dalam media pusat. Ini memberi ruang bagi representasi isu lokal, budaya, dan perspektif non-Jakarta yang selama ini kurang mendapatkan sorotan.

Pembebasan format dalam podcast memungkinkan narasumber mengekspresikan diri secara lebih manusiawi dan jujur, sehingga audiens dapat memahami gagasan mereka tanpa distorsi narasi media. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap konten yang disampaikan. Kehadiran berbagai jenis narasumber mempertegas bahwa podcast merupakan medium yang inklusif. Keberagaman perspektif membuktikan bahwa podcast bukan hanya ruang diskusi, tetapi juga arena pertukaran gagasan lintas generasi, profesi, dan ideologi.

Muncul konstruksi wacana tentang “Pemimpin Indonesia Ideal” melalui dialog terbuka

Podcast menyediakan ruang dialog yang terbuka sehingga memungkinkan pembentukan wacana tentang “Pemimpin Indonesia Ideal” secara natural melalui percakapan panjang. Berbeda dari format yang kaku, podcast mendorong eksplorasi gagasan tanpa tekanan.

Melalui dialog terbuka, narasumber dapat mendeskripsikan kualitas pemimpin yang mereka anggap penting, seperti integritas, keberanian bersikap, kemampuan komunikasi, dan



kedekatan dengan rakyat. Wacana ini terbentuk melalui narasi, pengalaman, dan kritik yang saling melengkapi.

Podcast juga memungkinkan kontras antara pemimpin ideal dan pemimpin faktual yang sedang memimpin. Perbandingan ini memperjelas apa yang dianggap publik sebagai kekurangan dan kelebihan seorang pemimpin di Indonesia. Selain itu, dialog terbuka memberi kesempatan bagi narasumber untuk menceritakan pengalaman personal terkait kepemimpinan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga negara. Cerita pribadi ini memperkuat karakteristik pemimpin ideal secara lebih konkret.

Wacana kepemimpinan ideal juga dibangun melalui kritik terhadap praktik kekuasaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Kritik ini tidak hanya menunjuk kesalahan pemimpin, tetapi juga mendefinisikan apa yang seharusnya dilakukan pemimpin yang baik. Dalam podcast, nilai budaya dan lokalitas seperti gotong-royong, etika, hingga filosofi tradisional turut mewarnai definisi pemimpin ideal. Dengan demikian, podcast menjadi ruang pembentukan wacana yang selaras dengan nilai-nilai Indonesia.

Dialog terbuka dalam podcast memungkinkan terjadinya pembongkaran ideologi kepemimpinan yang selama ini dominan. Narasumber dapat menantang narasi mainstream dan menawarkan konsep baru tentang pemimpin yang lebih relevan dengan zaman digital. Perdebatan antar narasumber tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin ideal memperkaya konstruksi wacana tersebut. Perbedaan pandangan membuat wacana kepemimpinan tidak monolitik, tetapi dinamis dan penuh nuansa.

Audiens yang berinteraksi melalui komentar atau media sosial ikut berperan dalam menguatkan wacana kepemimpinan ideal. Respons publik menjadi bagian dari proses konstruksi sosial yang hidup dan berkelanjutan. Dengan seluruh proses tersebut, podcast tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi berfungsi sebagai arena produksi wacana politik. Melalui dialog terbuka, podcast membentuk dan menyebarkan konsep pemimpin Indonesia ideal yang lebih humanis, demokratis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

SIMPULAN (CONCLUSION)

Penelitian ini menunjukkan bahwa podcast telah berkembang menjadi salah satu medium komunikasi yang paling signifikan dalam membentuk wacana publik mengenai kepemimpinan ideal di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem new media, podcast tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan diskusi politik berlangsung lebih terbuka, mendalam, dan bebas dari kontrol institusional yang melekat pada media arus utama. Dengan format long-form conversation dan distribusi digital yang tidak dibatasi durasi maupun sensor, podcast mampu menghadirkan dialog yang autentik dan reflektif, sekaligus memberikan peluang bagi berbagai kelompok—mahasiswa, tokoh nasional,



aktivis, dan akademisi—untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai apa yang dimaksud dengan “Pemimpin Indonesia Ideal.”

Temuan penelitian mengungkap bahwa podcast memainkan peran strategis dalam mengonstruksi wacana kepemimpinan melalui tiga mekanisme utama: (1) penyampaian gagasan dan kritik secara bebas, (2) representasi multisuara dari berbagai kalangan masyarakat, dan (3) pembentukan wacana ideal tentang figur pemimpin melalui dialog terbuka. Podcast memberikan ruang bagi narasumber untuk mengemukakan pengalaman personal, nilai-nilai budaya, serta kritik terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi. Hal ini memperkaya persepsi publik mengenai kualitas kepemimpinan ideal seperti integritas, transparansi, kedekatan dengan rakyat, visi jangka panjang, dan keberanian moral.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa kebebasan dalam podcast tidak sepenuhnya bebas dari tantangan struktural dan politis. Dominasi elite dalam produksi podcast populer, komersialisasi konten, serta kecenderungan algoritma digital dalam memperkuat polarisasi membatasi kualitas diskusi kritis yang seharusnya hadir secara merata. Selain itu, ancaman regulatif seperti Undang-Undang ITE serta tekanan politik terhadap podcaster independen menunjukkan bahwa kebebasan menyatakan pendapat di ruang digital masih bersifat rapuh. Kondisi ini menciptakan paradoks: podcast menawarkan potensi pemberdayaan, tetapi pada saat yang sama rentan dimanfaatkan oleh kekuasaan atau dibungkam ketika kritis.

Dari analisis wacana kritis (CDA), terlihat bahwa podcast bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi merupakan arena produksi wacana yang terlibat dalam proses hegemoni dan kontestasi ideologis. Melalui humor satir, framing naratif, hingga perbandingan kontras antara pemimpin ideal dan pemimpin aktual, podcast berperan dalam membentuk kesadaran publik tentang kepemimpinan yang etis, humanis, dan responsif. Interaksi audiens melalui komentar dan short clips di media sosial kemudian memperkuat proses konstruksi sosial ini, menjadikan podcast sebagai kekuatan kultural yang mempengaruhi opini publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa podcast merupakan medium ambivalen: di satu sisi memberdayakan, inklusif, dan demokratis; di sisi lain rentan terhadap manipulasi naratif, dominasi ekonomi, dan represi legal. Potensi podcast sebagai ruang kebebasan menyatakan pendapat serta sebagai forum pembentukan wacana pemimpin Indonesia ideal sebenarnya sangat besar, namun efektivitasnya bergantung pada tiga prasyarat utama: literasi digital masyarakat, independensi editorial para podcaster, dan reformasi regulatif yang melindungi kebebasan berekspresi. Jika ketiga aspek ini terjamin, podcast dapat menjadi platform rakyat yang sesungguhnya untuk melahirkan diskursus kepemimpinan yang visioner dan akuntabel bagi masa depan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Atton, Chris. *Alternative Media*. London: Sage Publications, 2002.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

- Benkler, Yochai. *The Wealth of Networks*. Yale University Press, 2006.
- Berger, Peter L., & Luckmann, Thomas. *The Social Construction of Reality*. London: Penguin, 1991.
- Bourdieu, Pierre. *On Television*. New York: The New Press, 1998.
- Castells, Manuel. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Castells, Manuel. *Networks of Outrage and Hope*. Cambridge: Polity Press, 2012.
- Coleman, Stephen. *How Voters Feel*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Corner, John. "Mediated Politics, Political Literacy." *Political Communication*, 2002.
- Dahlgren, Peter. *Media and Political Engagement*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Entman, Robert M. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication*, 1993.
- Fairclough, Norman. *Language and Power*. London: Longman, 2001.
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Fishkin, James. *When the People Speak*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon Books, 1980.
- Gitlin, Todd. *The Whole World Is Watching*. Berkeley: University of California Press, 1980.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press, 1989.
- Jenkins, Henry. *Convergence Culture*. New York: NYU Press, 2006.
- Lakoff, George. *Don't Think of an Elephant!*. Vermont: Chelsea Green Publishing, 2004.
- Lakoff, George. *Moral Politics*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
- Livingstone, Sonia. *Audiences and Publics*. Bristol: Intellect Books, 2011.
- McNair, Brian. *An Introduction to Political Communication*. London: Routledge, 2018.
- McQuail, Denis. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications, 2010.



Papacharissi, Zizi. *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Cambridge: Polity Press, 2010.

Reese, Stephen. *Framing Public Life*. New Jersey: Routledge, 2001.

Shirky, Clay. *Here Comes Everybody*. New York: Penguin, 2008.

Thompson, John B. *Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age*. Cambridge: Polity Press, 2000.

van Dijk, Jan. *The Network Society*. London: Sage Publications, 2020.

Wodak, Ruth. *The Politics of Fear*. London: Sage Publications, 2015.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).